

SKRIPSI

PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

FAIZATY HAURA

2210112058



DOSEN PEMBIMBING:

1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.
2. Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

No.Reg : 58/PKIV/IV/2026

**LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 58/PKIV/IV/2026**

**PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH
PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi
Perbandingan Indonesia dan Belanda)**

***UNDERCOVER BUY AND CONTROLLED DELIVERIES IN DRUG CRIMES
(Comparative Study of Indonesia and the Netherlands)***

**Disusun Oleh
Author**

**FAIZATY HAURA
NIM : 2210112058**

**Program Kekhususan (PK) : Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)**

**Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal 27
September 2026 dan dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

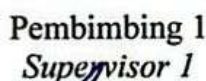
***This Minor Thesis Was Defended In the Comprehensive Examination Session on
April 27th 2026 and Approved by a Team Of Examiners Consisting of:***


Dekan
Dean

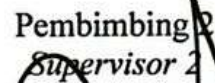
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001


Wakil Dekan 1
Vice Dean 1

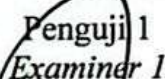
Dr. Nani Mulyati, S.H., MCl.
NIP. 198208092005012002


Pembimbing 1
Supervisor 1

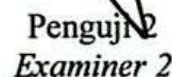
Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.
NIP. 196006251986031003


Pembimbing 2
Supervisor 2

Dr. Edita Elda, S.H., M.H.
NIP. 198601252009122004


Penguji 1
Examiner 1

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002


Penguji 2
Examiner 2

Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197801212005011001



No. Alumni Universitas	Faizaty Haura	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/11 September 2003	f. Tanggal Lulus : 27 Agustus 2026	
b. Nama Orangtua : Syamsul Bahri. dan Erma, S.H.	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan	
d. PK : Hukum Pidana	i. IPK : 3,86	
e. No. BP : 2210112058	j. Alamat : Komp. Puri Asri, Gunung Pangilun, Padang.	

PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)

(Faizaty Haura, 2210112058, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 144 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang berkembang dengan modus operandi yang kompleks serta melibatkan jaringan yang terorganisasi, sehingga termasuk salah satu bentuk kejahatan yang sulit diungkap melalui metode penyidikan konvensional. Dalam penanganan kejahatan terorganisasi, diperlukan teknik investigasi khusus, antara lain pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Di Indonesia, kedua teknik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Namun, pengaturannya masih menyisakan disharmoni norma dan kekosongan hukum terkait dengan batasan penggunaan teknik. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan pengaturan kedua teknik tersebut dengan Belanda yang telah mengaturnya secara sistematis melalui *Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB)* dalam *Wetboek van Strafvordering (SV)*. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda, kemudian bagaimana penerapan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda, dan bagaimana model ideal pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda telah mengatur pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan secara rinci, termasuk syarat penggunaan, kewajiban perintah tertulis dari jaksa, mekanisme pengawasan, serta larangan provokasi untuk mencegah praktik entrapment. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi disharmoni pengaturan antara UU Narkotika dan KUHAP 2025, belum memiliki pengaturan mengenai batasan tindakan aparat, serta masih terdapat praktik yang berpotensi memengaruhi kehendak pelaku dalam beberapa putusan pengadilan. Berdasarkan perbandingan tersebut, model ideal pengaturan dalam pembaharuan hukum acara pidana perlu memuat ketentuan definitif, batasan kewenangan, larangan provokasi, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana juga direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.

Kata Kunci: Pembelian Terselubung, Penyerahan di Bawah Pengawasan, Tindak Pidana Narkotika, Indonesia, Belanda.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus 27 Agustus 2026.
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas :	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Faizaty Haura	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang/ 11 th September 2003 f. Parents' Name : Syamsul Bahri. and Erma, S.H. b. Faculty : Law c. Concentration : Criminal Law d. Student ID : 2210112058	f. Graduation Date : 27 th August 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years 0 Month i. GPA : 3,86 j. Address : Komp. Puri Asri Blok E/5, Gunung Pangilun, Padang.	

UNDERCOVER BUY AND CONTROLLED DELIVERIES IN DRUG CRIMES (Comparative Study of Indonesia and the Netherlands)

(Faizaty Haura, 2210112058, Concentration Program Criminal Law (CP IV), Faculty of Law, Andalas University, 144 Pages, 2026)

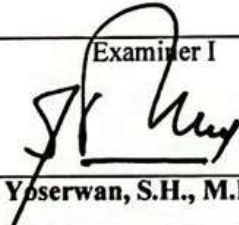
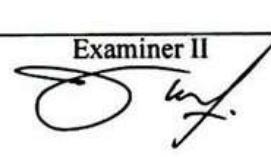
ABSTRACT

Drug-related crimes are evolving offenses characterized by complex *modus operandi* and involving organized networks, making them among the most difficult types of crimes to uncover through conventional investigative methods. In combating organized crime, specialized investigative techniques are required, including undercover purchases and controlled deliveries. In Indonesia, these two techniques are regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics (Narcotics Law) and Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025). However, these regulations still contain inconsistencies in legal norms and legal gaps regarding the limitations on the use of these techniques. Therefore, this study compares the regulations governing these two techniques with those of the Netherlands, which has systematically regulated them through the *Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB)* within the *Wetboek van Strafvordering (SV)*. The research questions in this thesis are: to determine how the regulations on covert purchases and controlled deliveries in Indonesia and the Netherlands compare; to examine how these techniques are applied in Indonesia and the Netherlands; and to identify an ideal model for regulating covert purchases and controlled deliveries within the context of criminal procedure law reform. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, case-based, and comparative legal approaches. The results show that the Netherlands has established detailed regulations governing covert purchases and supervised deliveries, including conditions for their use, the requirement for a written order from a prosecutor, oversight mechanisms, and a prohibition on provocation to prevent entrapment. In contrast, Indonesia still faces regulatory inconsistencies between the Narcotics Law and the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP), lacks regulations regarding the limits of law enforcement actions, and continues to see practices that could potentially influence the will of the perpetrator in some court rulings. Based on this comparison, the ideal regulatory model for the reform of criminal procedure law should include definitive provisions, limits on authority, a prohibition on provocation, implementation and oversight mechanisms, and the protection of human rights as also recommended by the Civil Society Coalition for the Reform of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Undercover Buy, Controlled Delivery, Narcotics Crime, Indonesia, Netherlands

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 27th, 2026.

Examiner,

Signature		Examiner I		Examiner II
Name	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.		Iwan Kurniawan, S.H., M.H.	

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: